

The results concluded that adat law principle of Kalosara, unity of indigenous people of Tolaki tribes. Lays on the proverb "*inae Kosara iye pinesara, inae lia sara iye pinekasarai*" within this word contain several legal principles, equality before the law and punishment principle. Moreover there are principles of adat law Kalosara through court decisions such as principle of no double imposition of criminal punishment, the principle of building a joint participation between perpetrators, victim and groups of community, Principles to push perpetrators responsible to the victims regarding injury or loss and building responsibility for not repeating criminal action that has been conducted.

Meanwhile the principle of adat law Kalosara which lays on the decision of Tolaki adat institute on the dispute settlement mechanism are good faith, humanity and respect to human dignity, principles as well as unity, harmony and legal certainty, principles to warrants implementation the decision of Tolaki adat institution.

Dispute settlement mechanisms through Tolaki adat institution are negotiation, mediation and adat court. Meanwhile dispute settlement model through adat institution is the model of Hybrid Justice system as harmonization model from legal values in Indonesia, which consists of mandatory mediation against criminal adat case and privat case. Other models in the disputes settlement through adat institution of Tolaki are the implementation of good faith all parties, while giving the adat sanction both on criminal adat case and privat case.

**Keywords:** Principle of Kalosara adat law, Alternative dispute resolution, Justice.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PROMOTOR DAN KO PROMOTOR.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>v</b>

<b>RINGKASAN.....</b>	x
<b>SUMMARY.....</b>	xvii
<b>ABSTRACT.....</b>	xxii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	xxiii
<b>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....</b>	xxvii
<b>DAFTAR PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA.....</b>	xxix
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	26
1.3 Tujuan Penelitian .....	27
1.4 Manfaat Penelitian.....	27
1.5 Kerangka Konseptual.....	28
1.5.1 Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.....	29
1.5.2 Prinsip Hukum.....	36
1. Prinsip Hukum dan Aturan Hukum.....	38
2. Keberlakuan dari Prinsip-Prinsip Hukum.....	43
3. Menemukan Asas-Asas Hukum.....	46
1.5.3 Keadilan.....	47
1.5.4 Alternatif Penyelesaian Sengketa.....	62
1.6 Metode Penelitian.....	65
1.6.1 Tipe Penelitian.....	66
1.6.2 Pendekatan Masalah.....	66
1.6.3 Bahan Hukum, .....	67
<b>1.6.4 Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum,.....</b>	69
1.7 Pertanggungjawaban Sistematika.....	74
<b>BAB II PRINSIP HUKUM LEMBAGA ADAT KALOSARA KESATUAN MASYARAKAT ADAT SUKU TOLAKI.....</b>	76
2.1 Hukum Adat.....	90

2.2 Hukum Adat sebagai Aturan Hukum.....	105
2.3 Ruang Lingkup Penyelesaian Sengketa Adat.....	
2.4 Prinsip Penyelesaian Sengketa oleh Lembaga Adat sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa.....	111
2.4.1. Periode sebelum Kedatangan Penjajah.....	113
2.4.2. Masa setelah Belanda Menjajah Indonesia.....	116
2.4.3. Masa setelah Indonesia Merdeka.....	122
1. Perundang-undangan.....	122
2. Putusan Pengadilan.....	136
2.5 Prinsip Hukum Adat Kalosara Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Suku Tolaki.....	138
2.5.1 Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Suku Tolaki.....	138
2.5.2 Hukum Adat Kalosara.....	145
2.5.3 Kalosara sebagai Pedoman Hidup Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Suku Tolaki,.....	148
1. Nilai, Norma,Ideologi, dan Prinsip Hukum.....	148
2. Norma sebagai Pedoman Hidup.....	150
3. Kalosara sebagai Pedoman Hidup.....	153
2.6. Prinsip Hukum Adat Kalosara dalam Putusan Pengadilan terhadap Perkara Tindak Pidana dan Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Adat Tolaki.....	168
2.6.1. Putusan Pengadilan terhadap Penyelesaian Perkara Tindak Pidana melalui Lembaga Adat Tolaki.....	168
1. Putusan MA No. 1664 K/Pid/1988 Tanggal 27 Maret 1991.....	168
2. Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 65/Pid.B/2010/PN Kendari.....	177
3. Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor. 92/Pid.B/2013/PN.Unh.....	182
4. Putusan Pengadilan Unaaha Nomor. 111 /Pid. B/2013/PN.Unh.....	186
	191

2.6.2. Putusan Lembaga Adat Tolaki.....	
2.6.3. Analisis Prinsip Hukum Adat Kalosara Pada Putusan Lembaga Adat Tolaki.....	226
1. Prinsip Itikad Baik.....	226
2. Prinsip Kemanusian (Harkat dan Martabat).....	227
3. Prinsip Persatuan dan Kesatuan.....	230
4. Prinsip Harmoni.....	241
5. Prinsip Kepastian Hukum.....	251
<b>BAB III MODEL PENYELESAIAN SENGKETA ADAT KESATUAN</b>	<b>257</b>
<b>MASYARAKAT HUKUM ADAT TOLAKI.....</b>	
3.1 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Adat Tolaki.....	257
3.1.1. Lembaga Adat Tolaki Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Suku Tolaki.....	262
3.1.2. Fungsi Lembaga Adat Tolaki.....	265
3.1.3. Prosedur dan Mekanisme Negosiasi oleh Lembaga Adat Tolaki.....	271
3.1.4. Prosedur dan Mekanisme Mediasi oleh Lembaga Adat Tolaki.....	272
1. Prosedur dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perdata Adat.....	280
2. Prosedur Mediasi Perkara Pidana Adat.....	286
3.1.5. Prosedur dan Mekanisme Peradilan Adat.....	296
3.2 Penyelesaian Sengketa oleh Lembaga Adat Tolaki sebagai Model Penyelesaian Sengketa Hukum dalam Sistem Hukum Nasional....	296
3.2.1. Sistem Hukum Nasional Berlandaskan Pancasila.....	301
3.2.2. Alternatif Penyelesaian Sengketa Hukum Adat Tolaki sebagai Model Penyelesaian Sengketa Nasional.....	301
1. Model Harmonisasi Nilai dalam Penyelesaian Sengketa di Indonesia.....	301

2. Model <i>Hybrid Justice system</i> dalam Penyelesaian Sengketa sebagai Bentuk Harmonisasi Hukum.....	306 313
3. Model Penjatuhan Sanksi Berdasarkan Itikad Baik Para Pihak.....	319 319
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>321</b>
4.1. Kesimpulan.....	
4.2. Saran.....	

**DAFTAR BACAAN****GLOSARIUM****DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-4

Undang-Undang Dasar sementara Tahun 1950

## **UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**

Undang-Undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 Tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan kekuasaan dan acara Pengadilan-pengadilan sipil. Lembaran negara Republik Indonesia No.9 Tahun 1951

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3821 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Lembaran Negara Republik Indonesia 167 Tahun 1999

Undang-Undang No. 30 tahun 1999, tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa.Lembaran Negara Republik Indonesia 138 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.Lembaran Negara Republik Indonesia 242 Tahun 2000

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.Lembaran Negara Republik Indonesia 6Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.Lembaran Negara Republik Indonesia 140 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Lembaran negara Republik Indonesia No.157 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia 125 Tahun 2004

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014

## **PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 Tahun 2014



## **PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 340K/Sip/1958  
Tanggal 19 November 1958.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1596K/Pdt/1985  
Tanggal 27 Januari 1987

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1644 K/Pid/1988  
Tanggal 15 Mei 1991.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 47P/HUM/2011  
Tanggal 23 Desember 2013

### **PUTUSAN PENGADILAN NEGERI**

Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 65/Pid.B/2010

Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 92/Pid.B/2013

Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 111 / Pid.B/2013

